

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

*Multinational Corporations* (MNC) merupakan pelaku independen yang beroperasi di berbagai negara dan menjadi alat kebijakan luar negeri dari negara-negara dimana perusahaan induknya berada. Dalam ilmu hubungan internasional, *Multinational Corporations* (MNC) dikategorikan sebagai aktor non-negara karena memiliki kekuatan dan kemampuan dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan suatu negara dalam aspek-aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya.

Setidaknya terdapat tiga peran MNC sebagai aktor non-negara di era globalisasi saat ini yaitu meningkatkan aliansi perusahaan internasional, meningkatkan peran-peran yang muncul dari MNC melalui kolaborasi secara internasional dan meningkatkan keamanan nasional secara komprehensif. Sayangnya, masih terdapat MNC sebagai aktor non-negara yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara, salah satunya adalah kasus serangan siber dan spionase yang dialami oleh Amerika Serikat. Diketahui bahwa negara tersebut merasa terancam oleh adanya penerapan teknologi baru 5G yang dilakukan oleh Huawei. Selain itu, Huawei tidak hanya bagian dari ancaman terhadap keamanan nasional saja, melainkan ancaman terhadap sistem perekonomian Amerika Serikat.

Sebagian upaya untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat, Donald Trump menerapkan kebijakan perintah eksekutif pada 15 Mei 2019 dan dapat diketahui bahwa bertujuan untuk melarang transaksi yang melibatkan teknologi informasi dan komunikasi atau layanan yang dirancang, dikembangkan, diproduksi atau dipasok oleh orang yang dimiliki oleh, dikendalikan oleh, atau tunduk pada yurisdiksi atau arahan dari musuh asing kapan pun karena dapat membahayakan keamanan nasional. Oleh karena itu, Huawei dilarang mengakses sistem android (*software*), dilarang menggunakan komponen microchip (*hardware*), Huawei terpaksa menjual *sub-brand* Honor dan Huawei mengalami penurunan dalam penjualan produk.

Selain itu, sebagai upaya proteksionisme terhadap neraca perdagangan Amerika Serikat yang mengalami defisit. Donald Trump menerapkan kebijakan penetapan bea masuk pada produk impor yang berasal dari Tiongkok, sehingga memicu perang dagang antara dua negara super power tersebut. Adapun alasan Donald Trump dalam menetapkan kebijakan tersebut karena memiliki kekhawatiran pada sistem globalisasi yang merugikan pihak Amerika Serikat. Donald Trump melancarkan proteksionisme bagi Tiongkok sebagai implementasi pada kampanyenya pada tahun 2016 yang bertajuk “*Make America Great Again*”. Hal tersebut dilakukan oleh Donald Trump sebagai bukti nyata dalam janji kampanye tersebut. Hingga akhirnya pada 8 Maret 2018, Donald Trump menandatangani aturan pada tarif bea masuk yakni sekitar 25 % untuk impor baja dan 10 % khusus untuk produk aluminium. Selain itu, Donald Trump juga menetapkan tarif impor terhadap berbagai produk dari Tiongkok yakni senilai US\$ 60 miliar atau senilai 825,2 triliun Rupiah. Lalu, tidak lama setelah Donald Trump menerbitkan kebijakan tersebut, Tiongkok akhirnya membalas hal serupa dengan menaikkan tarif impor hingga 25 % terhadap berbagai produk Amerika Serikat senilai US\$ 3 miliar atau setara 41,3 triliun Rupiah pada 128 jenis barang konsumsi yang berasal dari Amerika Serikat seperti buah, kacang, anggur hingga daging babi.

Melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok tersebut, dapat dikatakan bahwa kedua negara memiliki kekuatan yang memicu keduanya untuk menjadi negara *super power* yang memiliki pengaruh dalam dunia internasional. Selain memiliki keinginan untuk menguasai sistem teknologi global, kedua negara juga berambisi untuk menguasai sistem perekonomian global.

Melalui teori realisme dapat tercermin peran Amerika Serikat dalam melarang peredaran produk Huawei di Amerika Serikat melalui kebijakan perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh Donald Trump pada 15 Mei 2019. Hal ini lantaran Amerika Serikat khawatir Huawei dapat mengancam keamanan nasional negara melalui teknologi 5G yang diciptakan oleh Huawei. Terlebih Amerika Serikat berupaya untuk mempertahankan dominasinya di industri teknologi global dan menggambarkan situasi dunia yang diwarnai dengan kompetisi. Selain itu, Donald Trump juga menerapkan proteksionisme melalui kebijakan penetapan bea masuk

pada 8 Maret 2018 yaitu sebesar 25 % pada produk impor yang berasal dari Tiongkok, sehingga memicu perang dagang antara dua negara *super power* tersebut.

Terakhir, melalui konsep *non-traditional security*, dapat tercemin bentuk ancaman yang dapat muncul di luar ranah militer tradisional yaitu ancaman teknologi. Adapun, teknologi 5G yang dicetuskan oleh Huawei merupakan gagasan "*internet of things*" yang dapat menghubungkan seseorang dengan segala jenis fasilitas umum. Namun, teknologi 5G tersebut dapat menjadi ketakutan terbesar Amerika Serikat karena masih diragukan keamanannya. Oleh karena itu, melalui kebijakan perintah eksekutif Donald Trump terhadap Huawei, dapat dilihat bahwa hal tersebut merupakan upaya untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat dari ancaman non-tradisional yang ditimbulkan oleh Huawei (MNC) sebagai aktor non-negara tersebut.

## 5.2 Saran

Berikut merupakan beberapa saran terkait "Dampak Kebijakan Donald Trump Terhadap Pelarangan Produk Huawei di Amerika Serikat" yaitu:

- A. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan referensi dan pengetahuan terhadap peneliti selanjutnya sehingga akan mendapatkan pembahasan yang lebih optimal terkait penelitian sejenis dikemudian hari.
- B. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan disiplin ilmu yang berkaitan dengan teori realisme dan konsep *non-traditional security* terkait praktek pelarangan produk oleh MNC tertentu dan proteksionisme di dalam sistem global.